

**KONTRIBUSI KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Program Studi  
Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ARIEF BUDHI DARMA**

**R 100080045**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

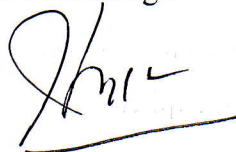
## LEMBAR PERSETUJUAN

### KONTRIBUSI KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURAKARTA

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

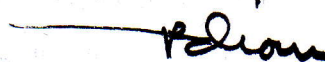
Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Absori, SH, M.Hum

Pembimbing II



Kelik Wardiono, SH, M.Hum

## **ABSTRAK**

**Arief Budhi Dharma. NIM. R.100080045.** Kontribusi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. **Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.**

Penyelenggaraan pajak di Indonesia ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Banyak sekali kasus-kasus berkenaan dengan mangkirnya para wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya kepada negara. Padahal wajib pajak tersebut adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan dengan melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan dari adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. (2) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN). (3) Untuk mengetahui model kedepan dalam meningkatkan kontribusi dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) UU KUP, UU PPh dan UU PPN tidak efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam membayar pajak di KPP Pratama Surakarta. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tidak efektifnya UU KUP, UU PPh, UU PPN adalah pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat yang masih kurang, sikap hukum serta perilaku hukum masyarakat. (3) Model hukum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan cara para pegawai pajak berani menjadi *whistle blower* dengan melaporkan setiap pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan hal ini masyarakat dapat menjadi percaya dengan contoh dari perilaku pegawai pajak bahwa mereka percaya bahwa masih banyak pegawai pajak yang memiliki integritas dan benar-benar mengabdikan untuk bangsa dan negara.

**Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Penerimaan Pajak**

## **ABSTRACT**

**Arief Budhi Dharma. NIM. R.100080045. Taxpayers Awareness Contribution to Revenue in KPP Primary Surakarta. Thesis. Graduate Program Master of Law Universty of Muhammadiyah Surakarta. 2012.**

Implementation of tax in Indonesia was not easy as imagined. There are so many cases with regard to mangkirnya taxpayers in fulfilling their obligations to the state. In fact it is the taxpayer Indonesian people themselves. Therefore, the government policy by making some changes to the tax laws. The purpose of the change in government policy, not the other is to increase taxpayer compliance and awareness.

The research objective is (1) to describe the effectiveness of the Law On General Provisions and Tax Procedures (Act CTP), the Law on Income Tax (Income Tax Act), and the Law on Value Added Tax on Goods and Services (VAT Act ) in raising awareness of corporate taxpayers and taxpayers to increase tax revenues in KPP Primary Surakarta. (2) To describe the factors that influence the effectiveness of the Law On General Provisions and Tax Procedures (Act CTP), the Law on Income Tax (Income Tax Act), and the Law on Value Added Tax on Goods and Services ( VAT Act). (3) To find the model forward in raising awareness of the contributions and corporate taxpayers and taxpayers to increase tax revenues in KPP Primary Surakarta.

The method used is normative. Specifications research is descriptive. Source of data used are secondary data and primary data. Data was collected through library research and interviews. The technique is the analysis of qualitative data analysis.

The results showed that (1) of the CTP, the Income Tax Act and the VAT Act is not effective to increase public awareness of Surakarta in paying taxes on KPP Primary Surakarta. (2) Factors affecting not effective KUP Act, the Income Tax Act, VAT Act is the legal knowledge and understanding of the law is still lacking, the attitude of the law and legal behavior. (3) Model law to increase taxpayer awareness is by tax officials dare to whistle blowers to report any violations in the field of taxation. With this people can trust with the example of the behavior of tax officials that they believe that there are many tax officials who have integrity and truly dedicated to the nation and the state.

**Keywords: Awareness Taxpayers, Tax Filing**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Penggalan potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak<sup>1</sup>.

Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (*tax reform*). Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Di dalam pembangunan diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber dana pembangunan yang menjadi andalan utama adalah sector penerimaan pajak.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai peranan yang penting di dalam pembangunan nasional. Sehingga sudah selayaknya bila perpajakan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian tidaklah begitu mudah untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Banyak sekali hal-hal yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, baik dari segi wajib pajaknya, dari aparat fiskusnya yang menyangkut pelayanan kepada wajib pajak maupun dari undang-undang perpajakannya sendiri serta kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan, yang menurut penilaian masyarakat terlalu sulit diterima dan dimengerti atau dijabarkan menurut pikiran mereka masing-masing.

Dalam membayar pajak, pemerintah selalu menyampaikan bahwa membayar pajak untuk keperluan pembangunan, realisasinya bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat penyalurannya sampai sekarang belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat pada persentase peningkatan jumlah wajib pajak yang sangat rendah. Wajib pajak yang terdaftar hingga kini kurang dari 3 %.<sup>2</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sector pajak maka di buatlah reformasi kebijakan perpajakan Direktorat Jendral Pajak melalui amandemen tiga Undang-Undang perpajakan yaitu, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Reformasi kebijakan tersebut termasuk juga penyempurnaan atas

---

<sup>1</sup> Kertawan, 2002. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang \_ Undang PPH terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assesment di KPP Tasik Malaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No. 2 Jilid 7

<sup>2</sup> Wulan Rahmadani. 2009. Persepsi Wajib Pajak Badan Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Surakarta, Universitas Islam Batik

ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan pelaksanaan dari ketiga Undang-Undang tersebut.<sup>3</sup>

Tujuan dari adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah tersebut diatas, tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan pada uraian diatas maka perlu diperhatikan mengenai efektifitas reformasi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Terkait dengan paparan tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN)?
2. Apakah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) telah efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta ?
3. Bagaimana model kedepan dalam meningkatkan kontribusi dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN).
2. Untuk mendeskripsikan efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta
3. Untuk mengetahui model kedepan dalam meningkatkan kontribusi dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

---

<sup>3</sup> Reformasi Kebijakan Perpajakan. Laporan tahunan 2008. Jakarta, Dirjen Pajak hal.29

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pajak.
  - b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di bidang hukum bisnis, khususnya mengenai kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dan sebagai pengetahuan tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang.

Dengan demikian, pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas ini, cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum pajak, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah dalam memungut pajak.

Besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka diperlukan kesadaran seluruh lapisan masyarakat pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian, dan kenyamanan.

Reformasi kebijakan Perpajakan yang berupa amandemen tiga Undang-Undang Perpajakan merupakan kebijakan Ditjen Pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan diimplementasikannya ketiga amandemen Undang-Undang Perpajakan tersebut, akan di ketahui sejauh mana efektifitas Undang-Undang tersebut dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga mampu memberikan kontribusi penerimaan Pajak.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian mengenai kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ken Devos, menghasilkan temuan bahwa Literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa banyak faktor, termasuk, ekonomi, sosial, psikologis dan demografis, dampak pada kepatuhan perilaku Wajib Pajak. Studi penelitian meneliti hubungan jika ada, yang ada antara variabel kepatuhan pajak besar dan sikap dan perilaku baik individu pembayar pajak yang dipilih Australia dan pajak

penghindar terhadap penggelapan pajak. Penelitian dukungan baik dari Kantor Pajak Australia dan sebuah perusahaan riset pasar terlibat dalam melakukan penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran menggambar data dari kedua instrumen survei dan wawancara pembayar pajak. itu temuan mengungkapkan bahwa pajak moral, keadilan pajak dan pajak tingkat yang lebih rendah penegakan dan pajak kesadaran baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Australia wajib pajak kepatuhan. Hal ini dipertimbangkan bahwa hasil penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pendapatan mengumpulkan dan memiliki implikasinya untuk pengembangan kebijakan pajak.<sup>4</sup>

2. Penelitian oleh Jose Abiola menghasilkan temuan bahwa penerimaan pajak yang meningkat merupakan fungsi dari strategi penegakan hukum yang efektif yang merupakan murni tanggung jawab administrasi pajak. Nigeria mesin penegakan kekurangan yang meliputi antara lain, memadai tenaga kerja, komputer dan efektif sistem pos dan komunikasi. Studi ini memiliki praktis yang jelas implikasi bagi para praktisi pajak dan pembuat kebijakan pemerintah di negara berkembang pada khususnya<sup>5</sup>.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghirmai Khefela menghasilkan temuan bahwa Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mempersiapkan studi kasus pada reformasi kebijakan pajak dan dampaknya, dengan spesifik tujuan meneliti reformasi pajak utama Ethiopia; Kenya, Uganda dan Ghana. Itu pandangan kebijakan pajak dari berbagai titik pandang, yang berfokus pada berbasis luas dari pendapatan pajak dan pada merancang pajak tertentu utama yang dipilih, kertas ini akan mencakup teori tanggung jawab fiskal bawah mana pemerintah menggunakan pendapatan dan pengeluaran program untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada pendapatan nasional, produksi dan praktek keuangan publik. negara salah satu faktor yang tidak memiliki pertumbuhan ekonomi yang kurang dari pendapatan untuk membiayai ekonomi pembangunan. Menyoroti pajak pendapatan dan profil komposisi, dan membahas masalah utama yang bisa mencegah dengan menerapkan kebijakan pajak yang berlaku di negara-negara. Ada kesenjangan yang besar antara Total kebutuhan investasi dan mobilisasi sumber daya domestik (Sachs et al., 2004). Sachs menyarankan bahwa sub-Sahara Afrika (SSA) akan membutuhkan ODA tambahan per tahun sekitar \$ 25 milyar untuk memenuhi MDGs<sup>6</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Chantal Whedderburn menghasilkan temuan bahwa Makalah ini menyajikan gambaran dari perekonomian pasar informal di Jamaika, sektor yang mewakili sekitar 40% dari GDP total. Secara khusus, kami fokus pada dampak dari informal pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Peneliti menyajikan diskusi yang mendukung transisi dari informal ke pasar formal, dengan analisis kelayakan pelaksanaan reformasi pajak dalam rangka untuk

---

<sup>4</sup> Ken Devos. A Comparative Study of Compliant and Non- Compliant Individual Taxpayers in Australia *Journal of Business and Policy Research* Vol. 7. No. 2. July 2011 Issue. Pp. 180 – 196

<sup>5</sup> James Abiola. Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 8 [Special Issue - April 2012] 99

<sup>6</sup> T. Ghirmai Kefela. Reforming tax policies and revenue mobilization promotes a fiscal responsibility: A study of east and West African states. *Journal of Law and Conflict Resolution* Vol. 1(5), pp. 098-106, October, 2009 Available online at <http://www.academicjournals.org/JLCR> ISSN 2006-9804 © 2009 Academic Journals



menangkap sejumlah besar tertagih pajak dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi pendapatan<sup>7</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ern Chen Loo, menghasilkan temuan bahwa Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengukur tingkat kesadaran pajak antara wajib pajak di Sabah dan Sarawak. Sangat penting untuk menjelaskan persiapan kami untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Self-Assessment System (SAS). Di Tahun 2004 dimana wajib pajak diharapkan menjadi fungsional pajak yang sadar dalam menghitung kewajiban pajak mereka sendiri secara akurat. Secara metodologis, subjek secara acak sampel dari pembayar pajak bekerja di kota-kota yang dipilih beberapa di Sarawak dan Sabah. Tes statistik seperti t-tes dan chi-kuadrat diterapkan ke sarana skor melek pajak oleh negara masing-masing dan pembayar pajak masing-masing tempat kerja. Para pembayar pajak di Sarawak yang ditemukan lebih sadar pajak dibandingkan dengan mereka rekan-rekan di Sabah. Meskipun demikian, para pembayar pajak di kedua negara akhirnya tidak siap untuk SAS. lebih agresif upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran pajak antara wajib pajak<sup>8</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-concreto.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang profil kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta, efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-

---

<sup>7</sup> Chantal Wedderburn. The informal economy in Jamaica: Is it feasible to tax this sector. *Journal of International Business and Cultural Studies* 2010

<sup>8</sup> Ern Chen Loo. Finding on the impact of Self assessment on the compliance behaviour of individual taxpayer in Malaysia a case study approach. *International Journal of Economic and Finance*

Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN).

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

#### **a. Data Skunder**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa data wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan serta penerimaan pajak dari tahun 2006 – 2010 yang ada di KPP Pratama Surakarta.

#### **b. Data Primer**

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data skunder.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

#### **b. Wawancara**

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya.

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Susunan dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Berfikir dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang Teori Implementasi Kebijakan, Teori Kesadaran Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Teori bekerjanya Hukum, Tinjauan umum pajak, (Pengertian Pajak, Pengelompokan Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Lembaga Pemungutnya, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan, Subyek dan Obyeknya, Metode Penghitungan Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi)

BAB III DESKRIPSI KANTOR PAJAK PRATAMA KOTA SURAKARTA berisi tentang Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Reformasi Bidang Perpajakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang Apakah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) telah efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta ? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN)? Bagaimana model kedepan dalam meningkatkan kontribusi dan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta?

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

## PEMBAHASAN

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom masyarakat<sup>9</sup>.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan melakukan amandemen UU KUP, UUPh dan UU PPN. Penurunan tarif PPh dalam UU PPh 2008 menjadikan tarif memberikan efek positif dengan tingkat kepatuhan masyarakat. Penurunan tarif diyakini akan meningkatkan penghasilan setelah pajak dari para wajib pajak sehingga ini akan mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh melaporkan penghasilannya. Hasil akhirnya, penghasilan yang

---

<sup>9</sup> Dahlan Thaib, dkk. 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal 64

dilaporkan akan lebih banyak dan karenanya, PPh yang dikumpulkan juga akan meningkat terlepas dari penurunan tarif.

Kebijakan penurunan tarif PPh sejauh ini mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hanya saja, perhatian terhadap kelompok wajib pajak dengan penghasilan tinggi tetap diperlukan mengingat, berdasarkan perhitungan efek penurunan tarif terhadap tarif efektif yang dihadapi wajib pajak, kelompok yang memperoleh penurunan tarif efektif terbesar adalah kelompok wajib pajak dengan penghasilan rendah dan menengah. Sedangkan kelompok wajib pajak penghasilan tinggi mengalami penurunan tarif efektif paling kecil.

Rakyat sangat berharap agar perundang-undangan pajak yang telah ada bisa menjaga pencapaian tujuan besar diadakannya kewajiban pajak itu sendiri. Pemerintah sebagai pengelola negara wajib pula membuat aturan yang sebaik-baiknya demi memenuhi amanat pemerintahan yang diberikan oleh rakyat. Perubahan perundang-undangan pajak yang salah satunya adalah UU KUP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara di segala aspek khususnya aspek perekonomian yang bersentuhan langsung dengan perihal pajak.

Pada UU KUP porsi perbaikan kualitas administrasi perpajakan mendapat porsi terbesar, karena KUP memang menitikberatkan pada masalah administrasi pajak yang semakin mapan.

Pada ketentuan yang telah diperbaharui diatur bahwa pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik. Hal ini akan menambah pilihan WP untuk memilih yang termudah. Kemudian batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak, bertambah 1 bulan dari peraturan sebelumnya. Selain itu untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan saja tanpa harus meminta persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Pada ketentuan yang telah diperbaharui diatur bahwa pembetulan bisa dilakukan sampai dengan daluwarsa (5 tahun dimana sebelumnya hanya diperbolehkan selama 2 tahun saja), kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Selain itu sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan adalah sebesar 150% yang sebelumnya diatur sebesar 200 %.

Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (Pembayaran setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga) sedangkan sebelumnya waktu ditetapkan sebelum tanggal 25 bulan ketiga berakhirnya tahun pajak. Selain itu jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan bertambah 1 bulan dari peraturan sebelumnya. Kedua hal ini menunjukkan fleksibilitas waktu pembayaran.

Dalam perubahannya UU KUP masih banyak memberikan kemudahan-kemudahan administrasi pajak yang dapat memberi keuntungan bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak serta kepercayaan terhadap administrasi pajak. Untuk mengatur produktivitas aparat pajak UU KUP juga membuat aturan yang mengikat bagi mereka yaitu :

Setiap pejabat Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini berlaku pula terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Namun ada beberapa keadaan dan hal yang dapat menyebabkan kerahasiaan itu bisa dibocorkan. Hal ini tidak diatur detail oleh peraturan sebelumnya.

Pengurangan terhadap terjadinya penghindaran dan Manipulasi Pajak akan semakin menyelamatkan banyak pemasukan negara yang berarti pula akan menyelamatkan pembangunan negara. Sistem pajak yang baik harus mampu meng-cover kemungkinan ini. Dalam UU KUP pengurangan terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak diantisipasi dengan peraturan tentang pemeriksaan. Pemeriksaan menjadi ujung tombak untuk mengesek kepatuhan dan kebenaran laporan wajib pajak dalam sistem self assesment.

Perpajakan di Kota Surakarta dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi dan pembangunan sektor swasta. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam 3 hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi.

Dalam UU KUP pengaturan yang diberikan untuk peningkatan iklim investasi dan pengembangan sektor swasta lebih berkaitan dengan hal yang sifatnya peningkatan pelayanan yang akan menarik investor serta mendorong pertumbuhan sektor swasta. Perundang-undangan pendorong lainnya di cakup oleh UU perpajakan PPh dan PPN serta peraturan-peraturan dibawahnya

Reformasi pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak memiliki makna yang luas dan terus berkembang. Reformasi perpajakan yang dimaksud adalah meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri. Fungsi lain dari perubahan UU KUP, UU PPh dan UU PPN adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kekuatan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Dalam hal ini, reformasi perpajakan dituntut untuk menciptakan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Reformasi pajak yang menyeluruh diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak dan jumlah wajib pajak yang patuh pun semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktifitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Faktor tersebut adalah bahwa setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial,

politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dengan menggunakan teori dari Seidmen tersebut dapat dijelaskan pengaruh faktor-faktor atau ketentuan-ketentuan sosial mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan. Demikian pula, pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum khususnya UU KUP, UU PPh dan UU PPN untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN)

Hukum itu efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi, di dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya.

Dari hasil penelitian ternyata UU KUP, UU PPh dan UU PPN dalam pelaksanaannya tidak dapat dikatakan efektif. Faktor – faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peneraan undang-undang tersebut adalah tidak terpenuhinya indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum

Salah satu upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi, mempunyai dampak hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi. Sanksi tersebut sebenarnya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Kadang-kadang, sanksi dirumuskan sebagai suatu persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang positif. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan sanksi positif merupakan suatu imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum tertentu).

Di dalam kenyataannya, tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif, apabila disertai sanksi-sanksi (baik yang positif maupun yang negatif). Ancaman hukuman mati terhadap perilaku tertentu, belum tentu akan mengurangi terjadinya kejahatan, walaupun mungkin pada beberapa masyarakat memang terjadi penurunan angka kejahatan dengan adanya ancaman hukuman mati tersebut.

Faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum, adalah masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri.

Hal yang berkaitan erat dengan itu adalah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi negatif. Kalau seorang warga masyarakat berani menanggung risiko, terutama kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan sanksi negatif. Kalau seorang warga masyarakat berani menanggung risiko, walaupun sifatnya spekulatif, maka akan dapat diduga bahwa sanksi tersebut segera dijatuhkan, maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan jauh lebih efektif, daripada apabila pelaksanaannya ditunda.

Kelambanan di dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku tertentu, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan, sanksi itu menjadi tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya lagi, sehingga wibawa dari hukum

maupun penegaknya juga akan mengalami kemerosotan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa proses peradilan yang lamban serta eksekusi keputusan pengadilan yang seringkali lambat, merupakan salah satu sebab tidak efektifnya hukum.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang yang terkena oleh sanksi tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena, di mana semakin sedikit orang yang terkena semakin tinggi pula efektivitasnya sanksi tersebut. Selain dari itu, maka hal itu juga tergantung pada kepribadian masing-masing. Ada manusia tertentu, semata-mata untuk memuaskan perasaan saja (misalnya, untuk melampiaskan dendam). Agaknya sulit sekali untuk mempengaruhi tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, yang pada umumnya akan dapat membatasi perilaku orang yang lebih banyak mempergunakan pikirannya. Orang-orang yang mempunyai kepribadian instrumental, akan lebih banyak mempergunakan pikiran, sebelum dia melakukan tindakan-tindakan tertentu. Selain daripada itu, maka perlu pula diperhitungkan peluang-peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat. Misalnya ada masyarakat-masyarakat tertentu yang menilai kekayaan material yang diperlihatkan atau dipamerkan sebagai suatu patokan bagi kedudukan yang relatif tinggi. Pameran kekayaan memberikan dorongan yang kuat untuk memperoleh kekayaan material tersebut melalui cara yang semudah-mudahnya dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya pula.

Kecuali dari itu, maka perlu pula dipertimbangkan karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi. Ada perilaku yang sukar sekali untuk diidentifikasi sebagai perilaku yang menyimpang atau bahkan menyeleweng. Misalnya, di Indonesia sukar sekali untuk mengkuilifikasi penyuapan dalam olahraga sebagai suatu delik pidana, sehingga juga sulit untuk membatasinya dengan sanksi negatif.

Keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan. Artinya, sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan, bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat. Apabila demikian halnya, maka penerapan sanksi-sanksi negatif tertentu, akan mendapatkan dukungan sosial yang luas dari masyarakat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Efektifitas Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dan wajib pajak orang untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa UU KUP, UU PPh dan UU PPN tidak efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Surakarta dalam membayar pajak di KPP Pratama Surakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Tidak efektifnya Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (UU PPN) adalah Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum masyarakat yang masih kurang, sikap hukum serta perilaku hukum masyarakat.

Model hukum untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan cara para pegawai pajak berani menjadi whistle blower dengan melaporkan setiap pelanggaran di bidang perpajakan. Dengan hal ini masyarakat dapat menjadi percaya dengan contoh dari perilaku pegawai pajak bahwa mereka percaya bahwa masih banyak pegawai pajak yang memiliki integritas dan benar-benar mengabdikan untuk bangsa dan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abiola, James. "Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria International". *Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 8 [Special Issue - April 2012]*.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi. "58% Badan Usaha di Jateng Mangkir Bayar Pajak". <http://bataviase.co.id/node/791440>. diakses 27 Desember 2011 jam 11.11 WIB.
- Devos, Ken. "A Comparative Study of Compliant and Non- Compliant Individual Taxpayers in Australia". *Journal of Business and Policy Research Vol. 7. No. 2. July 2011 Issue. Pp. 180 – 196*.
- Dahlan Thaib, dkk. 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirjen Pajak. 2008. *Reformasi Kebijakan Perpajakan*. Laporan tahunan 2008. Jakarta: Dirjen Pajak.
- Esmi Warasih, SH.MS. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosilogis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Foedjiawati, Hatane Samuel. 2007. "Pengaruh Sikap, Persepsi Nilai dan Persepsi Peluang keberhasilan terhadap niat menyampaikan keluhan (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi AIG Lippo Surabaya)". *Jurnal Manajemen Pemasaran Vol. 2 No. 1 Jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra*.
- Fajar Sodiq. "Banyak Tokoh Vokal Belum Bayar Pajak". <http://korupsi.vivanews.com/> diakses 27 Desember 2011 jam 11.35 WIB.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kusmuriyanto. 2006. "Implementasi Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa". *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Surakarta: UNS.
- Kertawan. 2002. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang PPH terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assesment di KPP Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2 Jilid 7*.
- Lexy J. Moleong 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.

- Loo, Ern Chen. "Finding on the impact of Self assessment on the compliance behaviour of individual taxpayer in Malaysia a case study approach". *International Journal of Economic and Finance*.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System*. New York: Russell Sage. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Welfare State", dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi 5. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho Riyadi Fitria. 2010. "Keterkaitan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang". *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Roberto Mangaibera Unger. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Solihin Abdul Wahab. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soenarko. 2003. *Public Policy pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. "Peranan Kesadaran Hukum Rakyat Dalam Pembaharuan Hukum". *Kertas kerja pada symposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Jakarta: BPHN – Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Percetakan Off Set Alumni
- Sihombing. 2005. *Evalusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tarjo dan Kusumawati. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu Studi di Bangkalan". *JAAI Volume 10. No. 1*, Juni 2006: 101-120.
- T. Ghirmai Kefela. "Reforming tax polices and revenue mobilization promotes a fiscal responsibility: A study of east and West African states". *Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 1(5)*,

Wulan Rahmadani. 2009. "Persepsi Wajib Pajak Badan Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan". *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Islam Batik.

Wedderburn, Chantal. "The informal economy in Jamaica: Is it feasible to tax this sector". *Journal of International Business and Cultural Studies* 2010.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah